

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Suwardjono (2010), mendefinisikan pengungkapan merupakan sebuah konsep, metoda dan media tentang bagaimana informasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pengungkapan adalah penyampaian informasi yang ditujukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Rupidara (2008) telah melakukan penelitian mengenai modal intelektual dan strategi pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa *intellectual capital* merujuk pada aset tidak berwujud (*intangible assets*) atau tidak kasat mata (*invisible*), yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Definisi *intellectual capital* lainnya diungkapkan oleh (Li dkk., 2019): *...the possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantages.*

Secundo dkk., (2020) telah melakukan penelitian mengenai Pembangunan berkelanjutan, modal intelektual dan kebijakan teknologi. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa menciptakan strategi pengelolaan modal intelektual di tingkat regional telah menjadi topik hangat karena semakin pentingnya modal intelektual sebagai pendorong kemajuan ekonomi.

Bontis (2002) telah melakukan penelitian mengenai Indeks Modal Intelektual Nasional. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Regional Intellectual Capital (RIC)* kini menjadi salah satu elemen sumber daya dan produktivitas bangsa yang paling penting karena mewujudkan nilai-nilai *intangible* individu, dunia usaha, lembaga, komunitas, dan daerah yang pada

hakikatnya menjadi sumber kekayaan dan pembangunan kesejahteraan masa depan.

Ulum dkk., (2023) telah melakukan penelitian mengenai indikator modal intelektual regional (RIC) di Indonesia. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ulum mengungkap komponen-komponen yang digunakan dalam pengungkapan *Regional Intellectual Capital* di Indonesia yang terdiri dari 6 Indikator utama yaitu Modal Manusia (*Human Capital*), Modal Pasar (*Market Capital*), Modal Proses (*Process Capital*), Modal Finansial (*Financial Capital*), Modal Pembaharuan (*Renewal Capital*), Modal Pembangunan Daerah (*Regional Economy Capital*).

Atidira dkk., (2020) telah melakukan penelitian mengenai eksplorasi *Intellectual Capital* Pemerintah Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Intellectual Capital* yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia memfasilitasi penyampaian layanan pemerintah daerah. Rogahang dkk., (2023) menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, namun juga dapat dilaksanakan di provinsi dan daerah.

B. Landasan Teori

Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman (1984) mendefinisikan *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Teori *stakeholder* diperluas dengan membahas moral dan nilai-nilai dalam mengelola organisasi, terkait dengan tanggung jawab sosial, kontrak sosial, dan ekonomi. Dalam organisasi sektor public, sektor public memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam. Keberhasilan dalam organisasi public maupun swasta ialah sejauh mana organisasi

tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama). Teori *stakeholder* mengansumsi hubungan Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *Stakeholder* (Putro, 2013). Putro juga menekankan pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Teori *stakeholder* memiliki asumsi bahwa pihak berkepentingan terhadap organisasi dapat mengendalikan atau mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemakai sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Dengan adanya pihak-pihak berkepentingan diharapkan dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangan daerah agar optimal sesuai dengan sumber daya yang ada di daerahnya, terutama dalam pengelolaan modal intelektual daerah.

C. Tinjauan Pustaka

1. *Intellectual Capital* (IC)

a. Definisi *Intellectual Capital*

Bontis (2000) menyatakan bahwa *intellectual capital* merupakan pengetahuan individu dan pengetahuan organisasi yang akan berkontribusi pada keberlangsungan *competitive advantages* suatu perusahaan. Edvinsson dkk., (1997) mengidentifikasi *intellectual capital* sebagai nilai yang tersembunyi (*hidden value*) dari bisnis. Maksudnya bahwa *intellectual capital* khususnya *intellectual asset* adalah aset yang tak terlihat seperti aset tradisional secara real ataupun pada laporan keuangan. Ulum (2009) menyebutkan bahwa *intellectual capital* dan aset tidak berwujud

adalah sama dan seringkali menggantikan (*overlap*). Sementara Edvinsson dkk., (1997) menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah bagian dari aset tidak berwujud.

Secara umum, Modal intelektual secara umum dibagi menjadi tiga komponen: modal pelanggan, modal manusia, dan modal struktural. Modal intelektual dianggap lebih luas. Tidak hanya sebagai aset perusahaan yang terkait dengan hubungan komersial dan lingkungan hidup, namun juga sebagai kekayaan intelektual. Modal suatu komunitas terikat pada kedekatan relasional dan geografis. Lalu, muncullah konsep modal intelektual nasional.

b. *Regional Intellectual Capital (RIC)*

Regional Intellectual Capital mengacu pada sejumlah aset intelektual yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu wilayah atau daerah tertentu. Aset intelektual ini mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, kebijakan, dan berbagai elemen lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu wilayah. Nilai-nilai tak kasat mata inilah yang menjadi akar pembangunan kesejahteraan masa depan.

Indeks RIC yang disajikan untuk wilayah Indonesia menawarkan banyak pilihan kepada pengguna dan keputusan tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan praktis seperti: Ketersediaan data yang dibutuhkan, kemudahan penerapan model, atau tingkat kompleksitasnya. RIC dibagi menjadi enam Indikator yang dapat diterapkan antara lain Modal Manusia (*Human Capital*), Modal Pasar (*Market Capital*), Modal Proses (*Process Capital*), Modal Finansial (*Financial Capital*), Modal Pembaruan (*Renewal Capital*), dan Modal Pembangunan Daerah (*Regional Economy Capital*). Berikut adalah beberapa komponen *Regional Intellectual Capital (RIC)* (Ulum dkk., 2023):

1) Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal manusia adalah kemampuan kolektif suatu populasi, yang tercermin dalam pendidikan, pengetahuan, kesehatan, pengalaman, motivasi, intuisi, kewirausahaan, dan keahlian. Selain itu, tenaga kerja berkualitas tinggi, ketersediaan ilmuwan dan insinyur, tenaga kerja perempuan, dan status kesehatan (harapan hidup, dokter) juga merupakan indikator yang baik. Modal manusia mencakup pengetahuan, kebijaksanaan, keahlian, intuisi, dan kemampuan individu untuk mewujudkan tugas dan tujuan nasional (Ulum dkk., 2023)

2) Modal Pasar (*Market Capital*)

Modal pasar mengacu pada aset yang tersedia yang direalisasikan dalam hubungan suatu negara dengan pasar internasional, (Ulum dkk., 2023).

Nilai ini menggabungkan kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam memberikan solusi yang menarik dan kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan internasional, keberhasilan investasi dan hubungan luar negeri, serta ekspor produk dan layanan berkualitas tinggi. Aset inti dalam hal ini meliputi loyalitas pelanggan dan nasional, keterbukaan terhadap globalisasi, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, ketahanan ekonomi, serta kepuasan pelanggan strategis dan mitra dagang nasional.

3) Modal Proses (*Process Capital*)

Modal proses merupakan kolaborasi dan aliran pengetahuan yang memerlukan aset intelektual struktural seperti sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, database, laboratorium, dan infrastruktur nasional (Ulum dkk., 2023).

Infrastruktur regional mencakup transportasi, keterampilan teknologi informasi, komunikasi dan komputerisasi, persiapan teknis dan layanan telekomunikasi, komputer pribadi, pelanggan telepon seluler, keamanan siber, fasilitas penelitian ilmiah yang

berkualitas, transfer pengetahuan, dan undang-undang untuk kewirausahaan.

4) Modal Finansial (*Financial Capital*)

Modal finansial mengacu pada produk domestik bruto (PDB), utang luar negeri, produksi industri menurut sektor-sektor utama, dan inflasi (Ulum dkk., 2023).

Modal Finansial merupakan Sumber daya terpenting yang dibutuhkan suatu negara dan sumber daya yang tidak dimiliki semua negara berkembang saat ini. Mengalirnya sumber daya langka suatu negara ke sektor perekonomian yang lebih efisien, disebabkan oleh pertumbuhan (PDB).

5) Modal Pembaruan (*Renewal Capital*)

Modal pembaruan mengacu pada investasi aktual yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan dan daya saing suatu negara di pasar masa depan, yang akan mendorong pertumbuhan di masa depan (Ulum dkk., 2023).

Aset pembaruan dan pengembangan mencakup investasi dalam penelitian dan pengembangan, paten, merek dagang, bisnis baru, jumlah publikasi ilmiah, jumlah paten yang terdaftar di Amerika Serikat, permohonan paten EPO, total pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, dan kapasitas inovasi (Ulum dkk., 2023).

6) Modal Pembangunan Daerah (*Regional Economy Capital*)

Modal ekonomi daerah dipahami sebagai suatu sistem kekayaan wilayah yang bersifat ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan hidup yang menjamin potensi pengembangan suatu tempat. Potensi konsep ini terletak pada mengidentifikasi kemungkinan interaksi antara faktor-faktor yang sifatnya berbeda (Ulum dkk., 2023). Dalam konteks perekonomian regional, penting untuk mengidentifikasi daya saing industri, pusat kegiatan industri, inisiatif ekonomi, dan perubahan ekonomi yang besar.

Definisi *Regional Intellectual Capital* yang disajikan pada bagian sebelumnya telah mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen spesifik RIC. Tabel 2.1 menyajikan ringkasan pengklasifikasian komponen-komponen RIC yang dimodifikasi di Indonesia (Ulum dkk., 2023):

Tabel 2. 1 Indikator RIC yang dimodifikasi di Indonesia.

No.	Indikator	Pengukuran
A	Modal Manusia (Human Capital)	
1)	Tenaga Kerja Terampil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk yang melek huruf 2. Jumlah masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan terstruktur, formal dan non-formal.
2)	Pelatihan Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Masyarakat yang mengakses Pendidikan formal 2. Jumlah masyarakat yang mengakses Kesehatan. 3. Angka harapan hidup 4. Peraturan ILO

No.	Indikator	Pengukuran
3)	Populasi Tingkat Melek Huruf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka melek huruf 2. Data demografi <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk b. Kepadatan c. Masyarakat usia produktif
4)	Pendaftaran Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data tingkat pendidikan 2. Jumlah ketersediaan sekolah
5)	Rasio antara Guru dan Murid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ketersediaan sekolah 2. Jumlah ketersediaan guru 3. Jumlah masyarakat yang sedang menempuh pendidikan 4. Rasio murid dan guru
6)	Pengguna Internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengguna layanan internet 2. Jumlah pengguna telepon seluler

No.	Indikator	Pengukuran
		3. Jumlah Perusahaan Penyelenggara telekomunikasi
7)	Pengeluaran Masyarakat utk Pendidikan	1. GDP 2. Alokasi Belanja Pendidikan
B Pasar Modal (<i>Market Capital</i>)		
1)	Usaha Lintas Negara	1. Ekspor bersih 2. Impor bersih 3. Realisasi penerimaan melalui bea masuk dan cukai
2)	Transparansi	1. Indeks kepuasan Masyarakat 2. Data NGO
3)	Ekspor Barang	1. Nilai Ekspor 2. Jumlah produk ekspor
4)	Bahasa Asing	1. Tingkat Pendidikan 2. Jumlah Lembaga Bahasa
5)	Sektor Pariwisata	1. Jumlah kunjungan Masyarakat asing

No.	Indikator	Pengukuran
		2. Jumlah kepergian masyarakat domestik
6)	Transaksi Bisnis	1. Kebijakan investasi 2. Masa investasi 3. Besar investasi 4. Jumlah industri manufaktur
7)	Layanan & Produk Internasional	1. Jumlah pekerja migrasi 2. Data remittent 3. Data Valas
8)	Penghargaan Internasional	1. Data partisipasi dalam penghargaan internasional
9)	Data Imigrasi & Emigrasi	1. Jumlah penduduk 2. Data mobilitas penduduk 3. Jumlah demografi
10)	Jumlah Atlet (Sosbud)	1. Data profesi atau karir
11)	Penampilan Perlombaan	1. Data profesi atau karir
12)	Jumlah Beasiswa	1. Data tingkat pendidikan 2. Data penerima beasiswa

No.	Indikator	Pengukuran
		3. Data pemberi beasiswa, baik pemerintah maupun swasta
C Modal Proses (<i>Process Capital</i>)		
1)	Lingkungan Persaingan Bisnis	1. Data UMKM 2. Jumlah UMKM yang menerima pembiayaan 3. Jumlah penerimaan pajak dari UMKM 4. Jumlah penyertaan modal negara untuk UMKM
2)	Efisiensi Pemerintah	1. Indeks kepuasan pemerintah 2. Data penyerapan keuangan dari pemerintah
3)	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	1. Data jumlah penerima dan pemberi HAKI
4)	Ketersediaan Modal	1. Jumlah UMKM yang menerima pembiayaan

No.	Indikator	Pengukuran
		2. Jumlah penerimaan pajak dari UMKM
		3. Jumlah penyertaan modal negara untuk UMKM
5)	Komputer yang digunakan per kapita	1. Jumlah pengguna layanan internet 2. Jumlah pengguna telepon seluler 3. Jumlah Perusahaan penyelenggara telekomunikasi
6)	Statistik Transportasi	1. Data jumlah kendaraan umum 2. Data kendaraan pribadi 3. Pajak 4. Panjang jalan
7)	Sektor Wirausaha	1. Data Start-up 2. Data UMKM
D	Modal Pembaharuan (Renewal Capital)	
1)	Penelitian Dasar	1. PDRB sektoral 2. Jumlah industri 3. Jumlah tenaga kerja 4. Jumlah penduduk

No.	Indikator	Pengukuran
2)	Pengeluaran Penelitian & Pengembangan	1. Data GDP baik income maupun expenditure
3)	Penelitian & Pengembangan	1. Jumlah pekerja formal dan informal
4)	Kerjasama antara Universitas & Perusahaan	1. Jumlah universitas 2. Jumlah Industri 3. Data kerjasama
5)	Mahasiswa Pascasarjana	1. Data tingkat pendidikan 2. Jumlah penerima LPDP 3. Jumlah lembaga pemberi beasiswa
6)	Merek Dagang	1. Jumlah merek dagang yang terdaftar 2. Jumlah PIRT
E	Modal Finansial (Financial Capital)	
	PDB Per Kapita (PPP) (Dari IMF)	1. Jumlah data GDP 2. Jumlah data PDB
F	Modal Pembangunan Daerah (Regional Economy Capital)	
1)	Daya Saing Industri	1. Jumlah PDRB

No.	Indikator	Pengukuran
		2. Jumlah output industri
		3. Jumlah industri
		4. Jumlah tenaga kerja
		5. Tingkat pendidikan
		6. Jumlah TPAK
2)	Penentuan Pusat Aktivitas Industri	1. Jumlah fasilitas umum
		2. Jumlah pasar
		3. Jumlah industri
		4. Jumlah TK
		5. Jumlah penduduk
3)	Penentuan Basis Ekonomi	1. PDRB ADHK Wilayah Prioritas
		2. PDRB ADHK wilayah Pembanding
		3. Penduduk
		4. TK
4)	Penentuan Pergeseran Ekonomi	1. PDRB ADHK Wilayah Prioritas
		2. PDRB ADHK wilayah Pembanding
		3. Penduduk
		4. TK

2. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. (Bhinadi, 2017)

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Todaro, (2006) mengatakan, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum

tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalamkaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Todaro, (2006), berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif.

Teori Kemiskinan Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan, terdapat dua paradigme atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigme Neo-liberal dan Sosial Demokrat

1) Paradigme Neo-Liberal

Para pendukung Neo-liberal berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/ atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Sementara itu, negara hanya berperan sebagai penjaga malam dan baru dapat melakukan campur tangan apabila Lembaga-lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya. Teori Neo-Liberal yakin

bahwa berkat keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi secara alamiah akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

2) Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat berpendapat bahwa kemiskinan bukan merupakan persoalan individual, melainkan merupakan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Para pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian kebebasan. Terwujudnya kebebasan hanya dapat dicapai apabila setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, misalnya pendidikan dan kesehatan yang baik serta pendapatan yang cukup. Negara mempunyai peranan penting dalam menjamin setiap orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2016), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena terdapatnya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitinya rendah, yang terdapat gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, terdapatnya diskriminasi atau keturunan. Ketiga,

kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara terdapat teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro (2013), kemiskinan yang terjadi di Negaranegara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pendapatan nasional Negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat;
 - b. Pendapatan perkapita Negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan terdapat beberapa yang mengalami stagnasi;
 - c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata;
 - d. Mayoritas penduduk di Negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut; Fasilitas pelayanan kesehatan buruk dan terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di Negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang terdapat di Negara maju.
- c. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Secara umum terdapat dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2016). Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan Absolut. Terdapat dasarnya, konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan.

Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi terdapat kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keterdapatan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2016).

2) Kemiskinan Relatif. Beberapa pakar berpendapat bahwa pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berterdapat dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keterdapatan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

d. Lingkaran Setan Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali di kenalkan oleh Ragnar Nurkse. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak terdapat pembangunan di masa lalu, tetapi

kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan: “suatu negara menjadi miskin karena merupakan Negara miskin” (*a country is poor because is poor*). Salah satu faktor sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan terdapat terdapatnya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad, 2016).

Pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan terdapat satu sisi lain pembentukan modal dipengaruhi oleh terdapat tidaknya faktor pendorong investasi. Negara berkembang kedua factor tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu:

- 1) Penawaran (*Supply*). Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Akibatnya, tingkat pembentukan modal rendah. Tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang-barang modal, dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap berterdapat terdapat tingkat yang rendah.
- 2) Permintaan (*Demand*). Negara yang miskin dukungan untuk menanamkan modal terdapat sangat rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Terbatasnya pasar disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah karena tingkat produktifitas yang rendah disebabkan oleh pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan oleh kekurangan dukungan untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung terdapat pangkalnya.